

### **BAB III**

## **Perubahan Politik Internasional dan Latar Belakang Dipertahankannya *Fukuda Doctrine* dalam Relasi Jepang-Asia Tenggara**

Perubahan politik internasional seperti yang kita tahu sudah banyak berubah, yang dulunya bipolar yang dimana ada dua negara adi kuasa yang sedang berkonflik yakni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Atau yang pada saat itu lebih kita kenal dengan periode Perang Dingin. Di periode ini juga merupakan masa dimana *Fukuda Doctrine* itu lahir dan awal hubungan antara Jepang dan ASEAN kembali membaik. Hingga politik internasional sudah multipolar yang dimana sudah tidak ada lagi dua kubu negara adidaya karena pada masa ini Uni Soviet sudah hancur. Namun yang menjadi sebuah perhatian adalah hubungan antara Jepang dengan ASEAN yang didasari oleh *Fukuda Doctrine* semenjak dibentuknya doktrin ini dari politik internasional yang dulunya bipolar hingga multipolar, *Fukuda Doctrine* tetap digunakan sebagai sebuah acuan dalam kerja sama antara Jepang dengan ASEAN. Sehingga didalam bab ini penulis akan membahas dua pokok bahasan, yakni bagaimana perubahan politik internasional di era pasca Perang Dingin dan alasan *Fukuda Doctrine* masih berlaku hingga saat ini.

### **A. Perubahan Politik Internasional Pasca Perang Dingin**

Seperti yang kita ketahui bahwa *Fukuda Doctrine* ini terbentuk pada saat Perang Dingin masih berlangsung, yang dimana pada saat itu konflik masih berkejolak diantara dua negara adikuasa (bipolar) yakni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jepang merupakan sekutu dari pada Amerika Serikat. Jepang yang pada masa itu dengan gencarnya melakukan pemulihan ekonomi pasca perang dunia kedua. Diawali oleh

Yoshida *Doctrine* yang dimana menggunakan pendekatan Ekonomi, dan di jalankan pada tahun 1957. Dan pada saat itu sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967 Jepang sudah masuk di Asia Tenggara untuk menjalin kerja sama.

Upaya meyakinkan Jepang bukan satu-satunya faktor yang meningkatkan hubungannya dengan Asia Tenggara di era pasca perang. Lanskap strategis yang berubah di Asia Timur selama tahun 1970-an juga membantu menciptakan peluang strategis. Menyusul pemulihan hubungan Tiongkok-Amerika yang diwujudkan dalam *Communique Shanghai* tahun 1972, struktur kompetitif Perang Dingin bergeser dari Amerika Serikat ke Uni Soviet dan Cina ke Uni Soviet ke Tiongkok dan ke Amerika Serikat. Lebih lanjut, di bawah pemerintahan Nixon, Amerika Serikat memutuskan untuk melepaskan diri dari Vietnam, yang mengakibatkan PHK AS dari Asia Tenggara. Dalam situasi ini, negara-negara anggota ASEAN menghadapi "*twin fear*" tentang potensi kemunculan kekosongan kekuasaan dan tentang peran Jepang di masa depan di Asia Tenggara.<sup>38</sup>

Pada Agustus tahun 1977 munculah *Fukuda Doctrine* yang dimana merupakan penyempurnaan dari doktrin sebelumnya yakni Yoshida *Doctrine*. Dengan menggunakan pendekatan "*heart-to-heart understanding*", doktrin ini lebih bisa di terima oleh masyarakat Asia Tenggara. Sepanjang Perang Dingin terjadi doktrin ini menjadi jembatan untuk untuk membangun kerja sama dengan ASEAN yang menitikberatkan untuk mengembalikan citra Jepang di mata ASEAN.<sup>39</sup>

Kecemasan Asia Tenggara mengenai praktik ekonomi Jepang meningkat selama tahun 1970-an, ketika Jepang memperluas ekspor karet sintetis. Negara-negara kawasan,

---

<sup>38</sup> Kei Koga, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>39</sup> Adiasri Putri Purbantina, *Loc. Cit.*

khususnya Malaysia, bergantung pada karet alam mereka sendiri untuk pendapatan nasional mereka. Kritik yang meningkat diungkapkan dalam komunike ASEAN 1973. ASEAN kemudian menyerukan pertemuan puncak Jepang-ASEAN untuk membahas masalah ini secara langsung. Tekanan politik kolektif ASEAN meyakinkan Tokyo untuk mengakomodasi permintaan ini dan membatasi produksi karet sintetisnya. Pengalaman positif ini dari perspektif negara-negara Asia Tenggara mengarah pada pengembangan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (PMC) dengan Jepang, dan Jepang setuju untuk menjadi mitra dialog ASEAN pada Maret 1977.<sup>40</sup> Dialog tahunan ini berfungsi sebagai forum bagi kedua negara. pihak untuk terus terang membahas masalah bilateral dan multilateral. Itu berfungsi sebagai saluran komunikasi penting untuk membangun kepercayaan lebih lanjut.

Perdana Menteri Takeo Fukuda dalam *Fukuda Doctrine* meyakinkan negara-negara Asia Tenggara bahwa meskipun ada kekosongan kekuasaan, Jepang tidak akan mencoba menjadi kekuatan militer atau mendominasi wilayah tersebut. Berbeda dengan tahun 1930-an dan 1940-an, Jepang tidak akan berupaya untuk mengeksploitasi peluang strategis untuk mengubah kekuatan ekonominya menjadi pengaruh dan kontrol yang lebih besar, tetapi bertindak sebagai "mitra setara" dengan Asia Tenggara. *Fukuda Doctrine* meredakan apa yang disebut kekhawatiran kembar (*twin fear*) ASEAN, memandu arah masa depan diplomasi Jepang, dan menjadi simbol persahabatan baru antara Jepang dan kawasan. Ketaatan Jepang yang konsisten

---

<sup>40</sup> ASEAN Secretariat, "*Joint Communique of the Sixth ASEAN Ministerial Meeting*" (press release, Pattaya, Thailand, April 18, 1973).

terhadap doktrin ini telah berkontribusi untuk waktu yang lama.<sup>41</sup>

Asia Tenggara selalu menjadi sub-wilayah penting untuk strategi kebijakan luar negeri Jepang.<sup>42</sup> Selama Perang Dunia II (WWII), Asia Tenggara berfungsi sebagai wilayah kritis sebagai sumber daya untuk kebijakan kekaisaran Jepang, terutama ketika struktur internasional menjadi tidak menguntungkan untuk kepentingan Jepang. Selama Perang Dingin, Asia Tenggara penting bagi Jepang sehingga kembali ke komunitas internasional setelah kekalahan di Perang Dunia II yang menghancurkan Jepang pada saat itu. Sejak pasar Cina secara resmi ditutup untuk Jepang, Asia Tenggara sekali lagi berfungsi sebagai sumber bahan baku dan pasar penting untuk produk Jepang. Hubungan Jepang dengan Asia Tenggara sangat penting bagi pemulihan ekonomi Jepang yang cepat dan akhirnya menjadi pemimpin ekonomi Asia.<sup>43</sup>

Pada era pasca-Perang Dingin yang dimana dunia sudah *multipolar*, ASEAN telah memperluas fungsi kelembagaannya untuk memasukkan agenda keamanan yang kuat untuk perdamaian dan stabilitas regional. Salah satu perwujudan upaya awal ke arah ini adalah pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) pada tahun 1994, yang digunakan negara-negara regional untuk membahas masalah keamanan di Asia-Pasifik dan untuk membangun rasa saling percaya. Pada waktu itu, banyak negara Asia Tenggara percaya bahwa berakhirnya Perang Dingin akan memicu pelepasan politik dan militer AS

---

<sup>41</sup> Kei Koga, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>42</sup> Bhubhinder Singh, "ASEAN's Perceptions of Japan: Change and Continuity," *Asian Survey* Vol. 42, No. 2, March/April 2002, pp. 276-296.

<sup>43</sup> *Ibid.*

dari Asia Timur. ASEAN dengan demikian berusaha menetralkan potensi kekosongan kekuasaan regional dengan alternatif untuk menyeimbangkan politik kekuasaan - pembentukan mekanisme keamanan kooperatif.

Jepang telah mengembangkan saling ketergantungan dan menjalin hubungan politik dan ekonomi yang erat dengan ASEAN, ditekankan oleh *Fukuda Doctrine* pada tahun 1977 dan Doktrin Takeshita pada tahun 1987. Namun, sebelum tahun 1997, kebijakan ASEAN Jepang menemui jalan buntu karena kurangnya inisiatif dan input baru yang dapat diatasi dampak lanjutan dari bencana Kaukus Ekonomi Asia Timur. Pada Januari 1997, meskipun ada masalah yang terkait dengan krisis penyanderaan di Peru, Perdana Menteri Hashimoto Ryutaro mengunjungi beberapa negara ASEAN (Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Brunei) dan mengusulkan pembentukan dari forum tingkat atas antara Jepang dan ASEAN. Selain itu, di Singapura, Hashimoto menyampaikan pidato kebijakan, "Reformasi untuk Era Baru Jepang dan ASEAN," yang menggarisbawahi kebijakan konsisten Jepang terhadap ASEAN sejak 1977.<sup>44</sup> Yang paling penting adalah ia mengusulkan tiga kebijakan berikut: untuk mempromosikan pertukaran yang lebih luas dan lebih dalam antara Jepang dan ASEAN di atas serta di semua tingkat lainnya; untuk memperdalam saling pengertian dan memperluas kerja sama budaya dalam rangka konsolidasi menjalin persahabatan Jepang-ASEAN; dan untuk bersama-sama mengatasi berbagai masalah yang dihadapi komunitas internasional secara keseluruhan.

---

<sup>44</sup>Sueo Sudo, "*Japan's Asean Policy: Reactive Or Proactive In The Face Of A Rising China In East Asia?*", *Asian Perspective* Vol. 33, No. 1, hal. 139.

Akhir dari Perang Dingin memaksa Jepang untuk mendefinisikan kembali perannya di dalam lingkungan internasional yang baru. Penurunan kekuatan Amerika yang dirasakan, ditambah dengan munculnya Cina, menyebabkan meningkatnya panggilan, baik dari luar maupun dari dalam Jepang. Bagi Jepang untuk mengambil peran yang lebih aktif dan bertanggung jawab dalam global dan urusan kawasan. Kritik pedas terhadap imobilisme politik Jepang menghasilkan reorientasi kebijakan luar negeri Jepang, hal ini menyebabkan dua perkembangan utama dalam hubungan Jepang-ASEAN. Pertama, ada peningkatan penekanan pada interaksi yang lebih besar dengan ASEAN, baik dalam hal wilayah maupun institusi. ASEAN mengambil status mitra yang hampir sama dengan Jepang bersama China dan AS. Hal ini disarankan dalam pidato Perdana Menteri Jepang Toshiki Kaifu pada tahun 1991 kepada anggota ASEAN di Singapura. Kaifu mengatakan: “Jepang dan ASEAN menjadi mitra yang matang yang dapat melihat dengan serius apa yang kami dapat lakukan untuk perdamaian dan kemakmuran Asia-Pasifik, dan untuk berpikir dan bertindak bersama untuk tujuan kita bersama.”<sup>45</sup> Kedua dalam bergerak lebih dekat ke ASEAN. Jepang mengisyaratkan keterlibatan yang lebih dalam dalam urusan regional. Ini merupakan perubahan besar dari fokus biasanya pada bantuan ekonomi dan investasi menjadi lebih terlibat secara politik di kawasan Asia-Pasifik. Seperti yang dikatakan Kaifu, “Saya merasa sangat tajam bahwa Jepang diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar di kawasan Asia-Pasifik — bukan hanya di bidang ekonomi tetapi di bidang politik juga.”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Talpin, “Japanese Foreign Policy.” hal. 83.

<sup>46</sup> Bhubhindar Singh, *Op. Cit.*, hal. 288.

Kerjasama ekonomi Jepang-ASEAN berkembang lebih jauh pada 1990-an. Pentingnya peran ekonomi Jepang digarisbawahi selama krisis ekonomi Asia 1997, ketika Jepang menjadi contributor dana terbesar untuk ekonomi Asia Tenggara yang sedang mengalami krisis ekonomi. Salah satu masalah utama yang harus diatasi Jepang dalam bidang ekonomi adalah kebangkitan Cina sebagai raksasa ekonomi. Beijing secara bertahap meningkatkan kehadirannya di Asia Tenggara melalui perluasan perdagangan bilateral dan hubungan politik. Hubungan antara Cina dan Asia Tenggara menjadi lebih dekat, karena para pemimpin dari kedua belah pihak telah bertukar kunjungan untuk "menambal perbedaan kuno dan menandatangani perjanjian substantif tentang segala sesuatu dari demarkasi perbatasan hingga perdagangan dan bahkan kerja sama militer." Seiring pengaruh Cina meningkat, posisi kepemimpinan Jepang terancam. Kekhawatiran ini digarisbawahi selama krisis ekonomi. Jepang tidak bertindak atas reformasi perbankan dan langkah-langkah stimulus ekonomi mendorong ASEAN untuk mengeluarkan pesan diplomatik yang luar biasa berotot untuk tindakan lebih cepat untuk membantu pemulihan wilayah. Meskipun Jepang lebih besar kontribusi dalam hal dana dan inisiatif, Cina secara umum di Asia Tenggara sebagai aktor yang lebih bertanggung jawab karena penolakannya terhadap mendevaluasi mata uangnya yang bisa menyebabkan memburuknya krisis.<sup>47</sup>

Pada tanggal 14 Januari 2002, di tengah kunjungannya ke ASEAN, Perdana Menteri Koizumi mengeluarkan pernyataan berjudul "*Japan and the ASEAN in the East Asia – A Sincere and Open Partnership*", yang kemudian dikenal sebagai

---

<sup>47</sup> Michael Richardson, Asian Nations Warn Japan Its Influence is on the Wane, *International Herald Tribune*, hal. 1.

“*Koizumi Doctrine*”. Doktrin ini menekankan pentingnya tentang aksi bersama dan maju bersama sebagai rekanan, dengan menekankan poin-poin kerjasama berikut ini: (1) menjalankan pembaharuan dan meningkatkan kemakmuran; (2) memperkuat kerjasama untuk memelihara stabilitas di kawasan; (3) merancang kerjasama untuk masa depan yang terdiri dari beberapa aspek berikut: (a) pendidikan dan pengembangan SDM; (b) menjadikan tahun 2003 sebagai “*Year of ASEAN-Japan Exchange*”; (c) perencanaan insiatif Kemitraan Ekonomi Jepang-ASEAN; (d) membuat sebuah proposal untuk meluncurkan “*an Initiative for Development in East Asia*”; (e) adanya intensifikasi kerjasama keamanan Jepang ASEAN, termasuk dalam isu-isu transnasional.<sup>48</sup>

Kebijakan ini juga mengingatkan kepada *Fukuda Doctrine* di tahun 1977 yang berisi empat hal penting yaitu (1) janji Jepang untuk tidak menjadi negara superpower dalam militer, (2) pembentukan kerjasama saling percaya antara Jepang dan negara Asia Tenggara, (3) kerjasama dengan ASEAN, dan (4) membantu memperkuat rasa percaya diri negara – negara ASEAN. Secara spesifik, memperkuat rasa percaya diri tersebut dengan membentuk komunitas regional. Jika dibandingkan, *Fukuda Doctrine* ini dikeluarkan karena ketika itu di tahun 1970-an pasca Perang Dunia II akibat terdapatnya pemikiran “anti Jepang”. Maka dengan adanya *Fukuda Doctrine*, diharapkan agar hubungan Jepang dan ASEAN bisa menjadi lebih dekat. Sebagai hasil nyata dari kebijakan ini seperti yang telah disebutkan diatas, Lee Kuan Yew kemudian memproklamkan kebijakan “*Look Japan*” di Singapura sedangkan Mahatir Muhammad dengan kebijakan “*Look East*”

---

<sup>48</sup> *East Asian Strategic Review 2003*, The National Institute for Defense Studies, Japan, Tokyo: Japan Times, 2003.

–nya, dimana keduanya berusaha untuk mempelajari rahasia kesuksesan ekonomi Jepang untuk Singapura dan Malaysia.<sup>49</sup>

Dikeluarkannya *Koizumi Doctrine* di tahun 2002 yang kembali menekankan pentingnya ASEAN bagi Jepang dinilai sebagai suatu respon instan Jepang terhadap langkah Cina yang memelopori *China-ASEAN Free Trade Area* (CAFTA) sebelumnya yang dibuat pada November 2001. Doktrin ini menegaskan pula bahwa dalam hubungan dengan kawasan Asia Tenggara, Jepang akan melibatkan aspek budaya yang lebih mendalam, dengan mengambil istilah *heart to heart relations* dari salah satu isi dari *Fukuda Doctrine*. Dalam *Koizumi Doctrine* juga ditekankan tentang gagasan untuk mengintensifikan kerjasama ekonomi Jepang-ASEAN, yang diwujudkan melalui adanya inisiatif Jepang untuk memulai negosiasi menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) Jepang-ASEAN. Jepang melakukan negoisasi EPA, dengan tetap menghindari komitmen liberalisasi di sektor pertanian.<sup>50</sup>

### **B. Alasan *Fukuda Doctrine* Masih digunakan**

*Fukuda Doctrine* merupakan ladan awal dimana hubungan Jepang dengan ASEAN mulai terjalin kembali. Semenjak itu hubungan antara Jepang dan ASEAN sangat erat dan berbagai macam bentuk kerja sama mulai terjalin. Yang sangat kontras ialah dalam kerja sama dibidang ekonomi, yang merupakan landasan awal dari *Fukuda Doctrine* ini dibentuk.

Pada tahun 2017 yang bertepatan pada perayaan ke 40<sup>th</sup> dari *Fukuda Doctrine*, doktrin ini telah menjadi simbol persahabatan dan kerja sama antara Jepang dan Asia Tenggara. Perdana

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> The National Institute for Defense Studies, *East Asian Strategic Review 2003*. Japan: The Japan Times, Ltd. hal. 211.

Menteri Takeo Fukuda dalam *Fukuda Doctrine* menekankan pentingnya hubungan antar masyarakat dan apresiasi mendalam Jepang terhadap Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Fukuda menyesalkan bahwa di masa lalu Jepang hanya melihat Asia Tenggara melalui prisma kepentingan materialnya sendiri. Selama masa kekaisaran, Jepang telah berupaya untuk mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan itu, termasuk lokasi minyak dan geostrategisnya di nexus Samudera Hindia dan Pasifik Barat.<sup>51</sup> Mengingat warisan Perang Dunia II, kawasan itu diyakinkan oleh penyebaran hukum Doktrin Fukuda bahwa Jepang akan menghindari pertikaian dan berusaha untuk meningkatkan kerja sama sosial-budaya dan ekonomi bersama. Pembuat kebijakan dan cendekiawan telah lama mencatat pentingnya doktrin ini dan terus menggarisbawahi nilai diplomatiknya, bahkan di era pasca-Perang Dingin.

Namun, hubungan Jepang-Asia Tenggara tidak pernah statis. Perdana Menteri Fukuda awalnya merancang tiga prinsip doktrinnya dalam upaya untuk memelihara hubungan "hati-ke-hati" yang positif. Sekarang, hubungan Jepang dengan Asia Tenggara telah melampaui dimensi sosial-budaya dan ekonomi untuk mencakup dimensi ekonomi, politik dan juga keamanan. Memang, Jepang telah tanpa henti dan proaktif mendukung evolusi arsitektur regional Asia Tenggara melalui bantuan pembangunan resminya (ODA), dukungan politik untuk pembangunan institusi di Asia Timur yang berpusat di ASEAN,

---

dan kapasitas pembangunan untuk negara-negara Asia Tenggara.<sup>52</sup>

Kemajuan ini penting terutama dalam periode transisi strategis saat ini, ketika Asia Timur menghadapi peralihan kekuasaan yang terutama disebabkan oleh kebangkitan Cina. Sejarah menunjukkan bahwa Asia Tenggara yang lemah atau terpecah cenderung mengundang persaingan kekuatan besar yang intensif, seperti persaingan antara Jepang dan negara-negara Barat menjelang Perang Dunia II, segitiga AS-Soviet-Cina di era Perang Dingin, dan pertumbuhan AS-China dan Jepang-China bersaing di era pasca-Perang Dingin. Mengingat ketidakpastian strategis yang dibawa oleh kebangkitan Cina, Asia Tenggara dapat sekali lagi menjadi teater bagi politik kekuatan besar. Juga, ketidakpastian kebijakan AS terhadap Asia Tenggara di bawah Presiden Donald Trump akan memperburuk tren ini. Dalam konteks ini, Jepang, yang telah berupaya memberdayakan Asia Tenggara, semakin penting dalam membentuk tatanan internasional di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Kebijakan luar negeri antara Jepang dan ASEAN yang berlandaskan *Fukuda Doctrine* hingga sekarang pada masa kepemimpinan Shinzo Abe merupakan penyempurnaan dari *Fukuda Doctrine*. Karena pada dasarnya hubungan Jepang dan ASEAN bisa terjalin hingga sekarang ini berkat *heart to heart understanding* yang dimiliki oleh *Fukuda Doctrine* dan dalam isinya sudah di sepakati bahwa ASEAN merupakan mitra yang setara dengan Jepang. Ada dua poin penting mengapa *Fukuda*

---

<sup>52</sup> See Lam Peng Er, ed., *Japan's Relations with Southeast Asia: The Fukuda Doctrine and Beyond* (New York: Routledge, 2013).

*Doctrine* masih digunakan sebagai landasan kerja sama antara Jepang dan ASEAN.

### 1. ASEAN Masih Menguntungkan bagi Jepang

ASEAN masih menguntungkan bagi Jepang karena pada dasarnya didalam *Fukuda Doctrine* menggunakan metode pendekatan Heart-to-Heart untuk melakukan kerja sama dengan negara-negara ASEAN, dan juga terlebih lagi *Fukuda Doctrine* yang didalam nya sudah tercantum point yang dimana ASEAN sudah dianggap sebagai mitra yang sejajar dengan Jepang dan juga menanamkan rasa saling percaya di antara kedua belah pihak dalam menjalin hubungan. ASEAN telah melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing ekonominya dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat integrasi regional sementara pada saat yang sama memperluas dan memperdalam saling ketergantungan ekonomi di luar kawasan. Saling ketergantungan ekonomi antara ASEAN dan Jepang terus meningkat, menjadikan ASEAN Jepang mitra dagang terbesar kedua<sup>53</sup>. Investasi langsung dari Jepang ke Negara-negara Anggota ASEAN selama lebih dari setahun terakhir telah mencapai tingkat yang menunjukkan keterkaitan ekonomi yang erat antara negara-negara Anggota ASEAN dan Jepang. Jepang telah membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota ASEAN dengan memberikan Bantuan Pembangunan Resmi bilateral (ODA), dengan

---

<sup>53</sup> ASEAN, “*The Asean-Japan Plan Of Action*”( [https://asean.org/?static\\_post=the-asean-japan-plan-of-action](https://asean.org/?static_post=the-asean-japan-plan-of-action)), Diakses pada 28 Februari 2019).

demikian berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini.

**Tabel 3. 1 *Japan's Grant Assistance (including technical assistance) to Southeast Asia, 2009-14 in million US dollars***

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Brunei	0.19	0.11	0.09	0.25	0.02	0.01	0.67
Cambodia	107.54	133.93	112.37	139.09	120.5	103.8	717.23
Indonesia	115.41	169.63	134.12	150.47	97.16	111.42	778.21
Laos	71.81	103.74	45.23	93.16	78.44	94.6	486.98
Malaysia	30.03	33.16	28.91	23.93	10.89	17.27	144.19
Myanmar	48.28	46.83	42.5	92.78	3287.1	202.78	3720.27
Philippines	89.53	128.05	96.62	140.97	122.91	82.21	660.29
Singapore	1.61	1.17	1.09	1.84	0.26	0.13	6.1
Thailand	52.01	71.25	53.14	85.34	71.98	49.4	383.12
Vietnam	109.07	158.68	151.81	168.65	129.28	128.43	845.92
Timor Leste	11.88	27.67	26.71	18.82	20.46	18.36	123.9

Source: Compiled by the Author from Japan's ODA White Paper 2010-2015

Jepang juga memiliki hubungan khusus dengan negara-negara anggota ASEAN untuk mempromosikan hubungan yang lebih kuat dengan ASEAN melalui mempromosikan perdagangan dan investasi, membangun prestasi yang telah dicapai sejauh ini. Sebagai mitra kerja sama ASEAN, Jepang menjadi salah satu negara rekanan yang telah menjalin hubungan terlama dan terus menjalin hubungan saling menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat keduabelah.

## 2. Peluang Jepang Sebagai Pemimpin Ekonomi ASEAN

Dengan adanya *Fukuda Doctrine* yang dulunya pertama kali di cetuskan oleh Perdana Menteri Takeo Fukuda memberikan peluang Jepang menjadi pemimpin ekonomi di ASEAN karena seperti yang kita ketahui Jepang pada saat pertama kali menjalin kerja sama dengan ASEAN menggunakan *Fukuda Doctrine* sebagai pintu masuk ke Asia Tenggara yang dimana pada saat itu Jepang di terima kembali oleh negara-negara di Asia Tenggara untuk memulihkan citranya terhadap ASEAN. Dalam kerja samanya dengan negara-negara di ASEAN, Jepang memberikan bantuan dan kepada negara-negara anggota ASEAN atau bisa dibilang ASEAN fokusnya kepada kerja sama ekonomi dengan memberikan bantuan dana kepada negara-negara di ASEAN baik itu untuk meningkatkan prekonomian ataupun mensejahterakan negara.

**Gambar 3.1** *Flying-Geese Model*



Sumber: google.com

Sesuai dengan kerangka teori *Flying-Geese* (Angsa Terbang) yang dimana Negara yang memiliki tingkatan industrialisasi paling tinggi diposisikan sebagai ‘pemimpin’ dalam kawanan ‘angsa-terbang’, dan diikuti oleh negara-negara lainnya yang memiliki kemampuan dibawahnya. Negara yang paling rendah kemampuannya ditempatkan pada barisan terbelakang dari kawanan tersebut.<sup>54</sup> Seperti yang terdapat pada ilustrasi di atas Jepang sebagai pemimpin kemudian dibelakang diikuti oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara.

**Tabel 3. 2 Arus Masuk Investasi Langsung Asing ( FDI) di ASEAN menurut Sumber Negara, 2007-2016**

Source Country	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 <sup>2/</sup>
ASEAN <sup>1/</sup>	8,434.5	8,987.5	8,807.8	16,306.4	16,426.6	23,538.0	18,209.3	21,555.9	21,552.4	24,682.0
REST OF THE WORLD	70,451.7	40,025.1	34,557.7	91,867.8	71,237.6	94,006.7	101,841.6	111,500.9	98,959.1	73,380.4
Australia	2,048.9	1,016.8	124.7	3,858.8	5,019.2	858.2	2,194.7	4,495.3	1,891.0	3,397.3
Canada	581.3	538.2	1,344.4	1,303.3	927.4	3,894.3	750.1	1,411.1	1,153.1	198.9
China	1,997.9	732.7	2,088.7	3,488.6	7,190.1	8,168.2	6,353.5	6,184.8	6,480.5	9,796.3
EU-28	21,485.1	10,408.7	5,859.9	21,146.2	24,289.1	-1,770.1	19,858.3	37,881.4	20,827.9	32,239.0
India	2,738.8	1,441.5	283.1	3,801.2	-2,078.9	7,311.1	2,108.1	1,218.2	958.1	1,048.8
Japan	8,822.9	5,512.3	3,451.1	12,987.0	7,753.8	14,618.1	24,358.6	12,981.5	14,757.9	11,535.6
Republic of Korea	2,273.4	1,397.0	1,804.1	4,319.3	1,773.9	1,305.6	4,252.9	4,890.3	5,710.4	5,743.5
New Zealand	105.6	-45.8	-140.8	339.5	24.6	-939.6	275.4	439.6	20.3	-498.6
Russian Federation	28.0	85.5	141.5	54.5	10.1	189.1	608.0	-113.2	-29.0	56.8
USA	8,917.9	3,685.2	5,180.8	13,882.1	8,088.6	19,115.6	11,179.8	13,577.7	23,433.9	12,214.4
Others <sup>3/</sup>	21,473.9	15,253.2	14,840.2	26,788.7	18,257.7	41,459.2	30,104.5	28,756.2	23,775.1	-2,382.4
<b>Total</b>	<b>78,886.3</b>	<b>49,012.6</b>	<b>43,365.4</b>	<b>108,174.2</b>	<b>87,664.2</b>	<b>117,544.7</b>	<b>120,059.9</b>	<b>133,056.9</b>	<b>120,511.5</b>	<b>98,042.5</b>

Source:  
ASEAN Secretariat

Notes:

<sup>1/</sup> Preliminary as of date of compilation.

<sup>2/</sup> Excludes reinvested earnings in the Philippines and Intra-ASEAN breakdown for Lao PDR (2012 and 2013) are estimated by the ASEAN Secretariat.

<sup>3/</sup> Includes unspecified country source for reinvested earning in Philippines and estimated extra-ASEAN for Lao PDR (2012 and 2013)

Data for 2016 are preliminary figures.

<sup>54</sup> Satoru Kumagai, *Loc. Cit.*

Berdasarkan data dari tabel diatas negara Asia yang tingkat FDI paling tinggi di ASEAN adalah Jepang yang kemudian diikuti oleh China. Jadi bisa disimpulkan bahwa *Fukuda Doctrine* masih digunakan Jepang sebagai landasan untuk menjalin kerja sama dengan ASEAN hingga sekarang ini karena Jepang merupakan aset penting bagi ASEAN, Jepang merupakan investor dengan tingkat FDI paling besar yang berkontribusi di ASEAN jadi posisi Jepang disini sangat menguntungkan bagi ASEAN terutama bagi negara berkembang yang menjadi salah satu anggota ASEAN yang ada di Asia Tenggara, terlebih lagi negara-negara anggota ASEAN. Kemudian Jepang juga memiliki peluang sebagai pemimpin ekonomi bagi ASEAN karena Jepang jika dilihat menurut *foreign direct investment* menduduki peringkat pertama untuk negara yang ada di Asia, kemudian menurut data tabel pada tahun 2013 Jepang menduduki posisi pertama dari *ASEAN Top Ten FDI Country Source*. Jadi bukan tidak mungkin jika Jepang dilihat dari tingkat FDI yang ada, bisa memberikan peluang Jepang untuk menjadi pemimpin ekonomi bagi ASEAN.

**Tabel 3. 3 ASEAN Top Ten FDI Country Source, 2013-2016**

2013			2014			2015			2016		
Country	Value	Share	Country	Value	Share	Country	Value	Share	Country	Value	Share
Japan	24,358.6	20.3	EU-28	37,861.4	28.5	USA	23,433.6	19.4	EU-28	32,239.0	32.9
EU-28	19,698.3	16.4	ASEAN	21,555.9	16.2	ASEAN	21,552.4	17.9	ASEAN	24,882.0	25.2
ASEAN	18,209.3	15.2	USA	13,577.7	10.2	EU-28	20,827.6	17.3	USA	12,214.4	12.5
USA	11,178.6	9.3	Japan	12,961.5	9.8	Japan	14,757.9	12.2	Japan	11,536.6	11.8
China	8,363.5	5.3	Hong Kong	8,627.3	6.5	China	6,480.5	5.4	Hong Kong	9,885.0	10.1
Hong Kong	4,449.8	3.7	China	8,194.8	4.8	Republic of Korea	5,710.4	4.7	China	9,799.3	10.0
Republic of Korea	4,252.9	3.5	Republic of Korea	4,680.3	3.5	Hong Kong	4,142.0	3.4	Republic of Korea	5,743.5	5.9
Australia	2,194.7	1.8	Australia	4,485.3	3.4	Taiwan	2,421.5	2.0	Taiwan	4,197.4	4.3
India	2,108.1	1.8	Taiwan	1,872.6	1.4	Australia	1,891.0	1.6	Australia	3,397.3	3.5
Seychelles	1,305.8	1.1	Canada	1,411.1	1.1	Canada	1,153.1	1.0	India	1,048.8	1.1
Top Ten Countries	84,068.6	78.4	Top Ten Countries	113,258.0	85.1	Top Ten Countries	102,350.6	84.9	Top Ten Countries	114,720.3	117.0
Others	25,582.4	21.6	Others	19,798.9	14.9	Others	18,160.9	15.1	Others	(16,577.8)	(17.0)
TOTAL		100.0	TOTAL		100.0	TOTAL		100.0	TOTAL		100.0
	120,650.9			133,056.9			120,511.5			98,042.5	

Source:  
ASEAN Secretariat

Berkat Adanya *Fukuda Doctrine* hubungan antara Jepang dan negara-negara di Asia Tenggara khususnya negara anggota ASEAN bisa terjalin kembali. Dan bahkan hubungan antara Jepang dengan ASEAN sangat erat, yang dimana dibuktikan dari *Fukuda Doctrine* itu dibentuk pertama kali oleh Perdana Menteri Takeo Fukuda yang pada saat itu Perang Dingin masih berlangsung dan pada saat itu juga Jepang kembali diakui oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara, yang dimana *Fukuda Doctrine* menjadi landasan kebijakan Jepang terhadap ASEAN dalam menjalin kerja sama. Pasca Perang Dingin yang dimana tatanan politik internasional telah berubah *Fukuda Doctrine* masih tetap digunakan sebagai landasan dalam kerja sama antara Jepang dengan ASEAN, di dalam *Koizumi Doctrine* juga berlandaskan kepada doktrin

sebelumnya yakni *Fukuda Doctrine* yang diamana salah satu isi dari *Koizumi Doctrine* menggunakan pendekatan *Heart-to-Heart* sama seperti *Fukuda Doctrine*.

Hingga pada masa kepemimpinan Shinzo Abe kebijakan yang digunakan merupakan penyempurnaan dari *Fukuda Doctrine*. Karena pada dasarnya hubungan Jepang dan ASEAN bisa terjalin hingga sekarang ini berkat *heart to heart understanding* yang dimiliki oleh *Fukuda Doctrine* dan dalam isinya sudah di sepakati bahwa ASEAN merupakan mitra yang setara dengan Jepang. Ada dua poin penting mengapa *Fukuda Doctrine* masih digunakan sebagai landasan kerja sama antara Jepang dan ASEAN. Pertama Jepang masih sangat menguntungkan bagi ASEAN karena Jepang merupakan negara yang banyak memberikan kontribusi seperti pemberian berbagai macam bentuk investasi dan juga Jepang telah membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota ASEAN yang dimana juga Jepang berkontribusi dalam perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Kedua ialah obsesi Jepang sebagai pemimpin ekonomi ASEAN, karena pada dasarnya dari awal kembali terjalinnya hubungan antara Jepang dengan ASEAN yang berlandaskan *Fukuda Doctrine* hingga sekarang yang menjadi pokok kerja sama kedua nya ialah pada bidang ekonomi, jika dilihat dari data tingkat FDI yang dimiliki Jepang terhadap ASEAN pada tahun 2013 menempati posisi pertama negara-negara besar yang ada seperti Amerika Serikat, EU dll. Namun jika dilihat berdasarkan region penyumbang FDI bagi ASEAN Jepang menduduki posisi pertama di Asia sebagai penyumbang FDI bagi ASEAN. Jadi bisa disimpulkan Jepang jika dilihat menurut *foreign direct investment(FDI)* bukan tidak mungkin jika Jepang masih bisa menjadi pemimpin ekonomi yang ada di ASEAN.